

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan juga dipercaya sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik.

Salah satu program pemerintah dalam rangka pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pengalokasian dana yang memadai adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai pada bulan Juli tahun 2005.

Jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah meningkat dari tahun ke tahun sejak pertama kali diluncurkan, kenaikan paling tajam terjadi pada anggaran 2009. Berikut perkembangan besaran dana BOS yang dialokasikan per siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) per tahun.

Tabel 1.1 *Unit Cost* Dana BOS untuk SMP per Siswa Tahun 2005 sampai 2017

No	Tahun Anggaran	Unit Cost per Siswa/Tahun
1.	2005	Rp 235.000,00
2.	2006 – 2008	Rp 254.000,00
3.	2009 – 2011	Rp 397.000,00 (Kabupaten) Rp 400.000,00 (Perkotaan)
4.	2012 - 2014	Rp 580.000,00
5.	2015	Rp 1.000.000,00
6.	2017	Rp 1.000.000,00

Pengalokasian dana BOS dikatakan efektif apabila dana yang ditetapkan tepat guna dan tepat sasaran. Dana BOS dinilai efektif jika penggunaan dana tersebut menunjukkan sampai seberapa jauh dana tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila implementasi program BOS berjalan sesuai aturan. Maka, diharapkan semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan dasar menengah secara gratis mulai SD-SMP-SMA/K. Adagium “Sekolah mahal adalah sekolah bermutu” maka tidak berlaku.

Semua warga negara dapat mengakses pendidikan dengan gratis. Tidak ada warga negara dalam usia wajib belajar yang putus sekolah karena tidak

mempunyai dana. Sehingga, 20 tahun mendatang, semua warga negara telah *well educated*, tidak ada yang tidak berpendidikan apalagi buta huruf.

Seperti kisah sukses penggunaan dana BOS dari Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang dikutip di lama internet milik setkab (setkab.go.id)

Dengan adanya dana BOS, kegiatan belajar-mengajar bisa digratiskan, karena seluruh biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah. Hal inilah yang membuat akses pendidikan semakin meluas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini yang dirasakan masyarakat Sragen khususnya pelajar dari keluarga kurang mampu. Alokasi dana BOS SD/SMP di Kabupaten Sragen untuk 2014 mencapai Rp73,5 miliar, angka ini lebih tinggi dibandingkan alokasi 2013 sebesar Rp72,4 miliar. Dana tersebut juga didukung alokasi dari APBD 2013 untuk pendidikan sebesar Rp125 miliar, dan di tahun 2014 menjadi Rp89 miliar.

Dana BOS yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAPBS.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik negeri maupun swasta, menggratiskan seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah. Kebijakan sekolah gratis ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, selain kenaikan *unit cost* dana BOS yang diberikan kepada sekolah.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, program BOS tidak selalu berjalan dengan mulus sebagaimana yang diharapkan. Beberapa persoalan muncul,

misalnya terkait dengan jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah yang didasarkan pada *unit cost* tiap siswa dikalikan dengan jumlah murid.

Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid besar, biaya operasional bisa tercukupi karena sekolah tersebut menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Namun, bagi sekolah yang jumlah muridnya kecil, dana yang diterimanya akan kecil dan tidak cukup mengingat ada sejumlah pos yang jumlahnya sama dan harus dikeluarkan tanpa membedakan apakah sekolah memiliki jumlah siswa besar atau kecil.

Pada Kamis-Sabtu (1-3 Mei 2014), Sejumlah elemen masyarakat peduli pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul mengevaluasi alokasi dana BOS sekaligus mengidentifikasi modus-modus penyimpangan dana BOS. Mereka mengadakan acara tersebut di Hotel Indah Palace Solo. Seperti yang dikutip oleh harian SOLOPOS tanggal 9 Mei 2014.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain :

1. Rekomendasi untuk otoritas pengelola pendidikan di kabupaten/ kota
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Bimbingan Teknis
 - b. Peningkatan kualitas pengawasan
2. Rekomendasi untuk sekolah
 - a. Membuka dokumen dana BOS agar bisa diakses masyarakat
 - b. Pertemuan Rutin dengan walimurid
 - c. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana BOS oleh sekolah
 - d. Dewan Pendidikan mendorong pengelolaan pendidikan kabupaten / kota agar perencanaan dan seterusnya dilakukan secara partisipatif

3. Rekomendasi untuk masyarakat atau walimurid

- a. Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan dalam mengelola dana BOS

Menurut artikel yang dirilis oleh kemenkeu.go.id maka pelaksanaan BOS masih mengalami penyimpangan disana dan disini. Penyimpangan tersebut antara lain :

- a. Tahap perencanaan, adalah dengan menggelembungkan data jumlah siswa. Siswa yang sudah pindah atau lulus tetap dimasukkan dalam daftar penerima dana BOS dengan harapan dana yang diperoleh sekolah bertambah.
- b. Modus lainnya dengan mengajukan anggaran belanja fiktif, memperbanyak anggaran tak terduga, menjalin kolusi dengan panitia, membikin belanja barang habis pakai secara berulang-ulang, dobel anggaran, hingga menerima program titipan.
- c. Tahap pencairan, kebocoran dana BOS terjadi dengan modus memperlambat pencairan hingga pemberian gratifikasi atau uang terima kasih. Modus-modusnya rapi dan tak kasat mata.
- d. Pada tahap pembelanjaan, modus membocorkan dana BOS dengan menurunkan kualitas spesifikasi barang. Pengelola dana BOS telah berkolusi dengan instansi/penyedia barang.
- e. Tahap pelaporan, bukan hanya keterlambatan pelaporan. Tetapi juga penyajian laporan meliputi transparansi dan akuntabilitas laporan. Kasus-

kasus demikian banyak ditemukan di berbagai daerah ketika pemeriksa/pengawas membandingkan dokumen rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) dengan laporan pertanggungjawaban (LPj). Spesifikasi barang di RKAS dengan LPj banyak yang berbeda. Dampaknya tak hanya kualitas yang tak sesuai standar, tapi ada alokasi dana yang sengaja dihilangkan.

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen dana BOS, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa:

“Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien”.

Apabila kita membandingkan antara Teori dan Praktek pengelolaan dana BOS maka kita menemukan gap. Oleh sebab itu, Ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian pengelolaan dana BOS.

Penelitian tentang pengelolaan dana BOS sebenarnya telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Giyanto untuk memperoleh gelar S2 di Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operaional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan”

Penelitian tersebut adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi tentang pengelolaan BOS. Penelitian ini bertujuan (1) mendiskripsikan tingkat transparansi pengelolaan dana BOS dan; (2)

mendiskripsikan partisipasi komite sekolah / masyarakat dalam pengelolaan dana BOS.

Penelitian terdahulu membahas tentang transparansi dan partisipasi saja. Peneliti sebelumnya belum meneliti proses pengelolaan BOS mulai dari perencanaan sampai pelaporan dalam pengelolaan dana BOS. Sehingga ini adalah gap / celah dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, Perlu dilakukan penelitian analisa deskriptif. untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan dana BOS sudah memenuhi prinsip-prinsip penggunaan dana BOS yang tertuang dalam Pasal 6 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 yaitu efektif, efisien, transparan, akuntabel, kepatuhan dan manfaat.

Penulis akan menganalisa pengelolaan dana BOS dengan analisa deskriptif. Beberapa Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Di Kota Surakarta mendapatkan dana operasional sekolah (BOS yaitu SMP Muhammadiyah 6 Surakarta.

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta diatas telah mewakili atau menjadi sampel pada penelitian dikarenakan sekolah tersebut telah menerima dan mengelola dana BOS. Sekolah yang mewakili dari sekolah swasta di Surakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian berjudul : “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Surakarta”.

Bahwa usulan penelitian yang penulis ajukan adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Namun, Penulis menyadari bahwa beberapa tulisan ilmiah yang lain berasal dari beberapa Universitas memiliki bahasan yang hampir sama.

B. Rumusan Masalah

Fokus kajian penelitian ini yaitu pengelolaan dana BOS mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dana BOS. Fokus penelitian dirinci menjadi tiga rumusan masalah.

1. Bagaimana perencanaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta
2. Bagaimana realisasi dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta
3. Bagaimana pelaporan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta

A. Tujuan Masalah

Penelitian ini ada tiga tujuan yaitu :

1. Meneliti bagaimana perencanaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta.
2. Meneliti bagaimana realisasi dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta.
3. Meneliti bagaimana Pelaporan Penggunaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi sekolah.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya Khasanah Penelitian mengenai Pembiayaan Pendidikan
 - b. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai Pembiayaan Pendidikan khususnya tentang Pengelolaan Dana BOS.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi kepada manajemen pelayanan BOS (Sekolah, Masyarakat dan Pemerintah) dalam menerapkan program BOS berikutnya .
 - b. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengelola dana BOS.